

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah yang tersebar di seluruh wilayah negeri sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebagai negara agraris Indonesia memiliki sebagian besar jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor primer sekaligus sektor yang memegang peranan penting bagi jalannya roda perekonomian nasional. Kondisi tanah yang subur untuk digunakan bercocok tanam menjadi faktor yang menunjang kegiatan tersebut di Indonesia. Sektor pertanian berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus sebagai aspek pembangunan di negara berkembang. Berdasarkan pemaparan dari Tulus T. H. Tambunan (2003), yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi negara berkembang lebih unggul dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

Tabel 1.1 Jumlah Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

No.	Nama Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1.	Pertanian	40.635.997
2.	Perdagangan Besar-Eceran	25.800.553
3.	Industri Pengolahan	18.671/926
4.	Akomodasi-Makan-Minum	9.635.433
5.	Konstruksi	8.188.425

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Menurut hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sektor pertanian dan perhutanan, jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut mencapai 40.635.997 jiwa, yang mana menjadi lapangan pekerjaan yang menyerap paling banyak tenaga kerja domestik. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat fantastis karena persentasenya mencapai 29,96% dari total keseluruhan penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 135,61 juta jiwa sekaligus menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan lapangan pekerjaan utama lainnya. Dengan begitu besarnya potensi alam Indonesia di bidang pertanian seharusnya menjadikan para petani di Indonesia menjadi individu maju dalam bidang ekonomi karena sumber daya alam yang dimiliki sangat luas dan permintaan pasar akan produk hasil pertanian terus bertambah.

Meskipun sektor pertanian merupakan sektor raksasa di Indonesia, tidak menutupi fakta bahwa sebagian besar petani Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Fakta pahit ini seakan-akan harus diterima apa adanya. Fakta bahwa tingginya tingkat petani miskin di Indonesia menjadi mustahil untuk dipercaya jika melihat betapa besar kekayaan alam dan lahan yang subur yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar petani masuk dalam garis kemiskinan. Penghasilan yang didapatkan oleh para petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Petani tidak mampu untuk mengakses kebutuhan sekunder, seperti mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Tabel 1.2 Presentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama

No.	Sumber Penghasilan Utama	Rumah Tangga Miskin (%)	Rumah Tangga Tidak Miskin (%)
1.	Pertanian	51,33	31,6
2.	Lainnya	29,69	47,05
3.	Tidak Bekerja	12,9	12,22
4.	Industri	6,08	9,13

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Kemiskinan rumah tangga di sektor pertanian dapat terjadi karena rendahnya pendapatan yang tidak bisa menutup pengeluaran dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, karena rendahnya pendapatan, tidak pula memiliki profesi yang mapan untuk menggantungkan kebutuhan hidup merupakan penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar rumah tangga yang bersumber penghasilan utama di sektor pertanian di Indonesia menyebabkan para petani sulit dalam membiayai akses pendidikan layak sehingga menjadikan kurangnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh parapetani mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Sektor pertanian di Indonesia terbagi menjadi tujuh subsektor utama yakni Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Jasa Pertanian. Indonesia sendiri memiliki potensi sektor di sektor kehutanan yang sangat besar. Dilansir dari *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa

luas lahan berhutan di Indonesia adalah 94,1 juta hektare, atau lebih dari setengah dari total luas daratan Indonesia. Berbicara mengenai kekayaan hutan di Indonesia, hutan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Tanaman dan satwa yang ada dalam hutan adalah potensi hutan yang tidak boleh dianggap remeh. Komponen-komponen hutan turut menyediakan berbagai tanaman yang dapat dipergunakan sebagai sumber oksigen, bahan makanan, bahan bangunan, serta obat-obatan herbal yang berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan menjadi penyangga kehidupan yang eksistensinya tidak dapat digantikan dengan hal apapun.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang termasuk dalam kategori dapat diperbaharui, artinya, hutan tergolong ke dalam sumberdaya alam yang selalu bertumbuh atau tidak pernah habis (*renewable resources*). Ekosistem hutan dinilai sebagai ekosistem yang bersifat stabil, dalam ekosistem hutan terjadi keseimbangan antara komponen produsen (tumbuh-tumbuhan hijau), konsumen (hewan), dan dekomposer yang bertugas sebagai pengurai. Sebagai sumberdaya alam yang termasuk ke dalam kategori dapat diperbaharui, dapat diartikan hutan berpotensi untuk menyuplai sumberdaya alam yang sifatnya *infinite* atau tidak terbatas serta memberikan daya dukung lingkungan yang layak, maka dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan seoptimal mungkin.

Kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan secara terpusat atau sentralistik, yang mana hanya dikelola oleh negara, dinilai kurang efektif dalam menjaga wilayah kehutanan dan hanya melakukan eksploitasi hasil hutan tanpa didasari oleh prinsip-prinsip sosial.

Melalui pengelolaan hutan yang bersifat terpusat, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Padahal sejatinya, keterlibatan masyarakat yang ada di daerah sekitar hutan merupakan bagian yang sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu menunjukkan keberlanjutan ekosistem hutan dan kepedulian terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar hutan.

Dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya, hutan harus dilakukan secara lestari. Setiap upaya dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian (*sustainable*). Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari penting dilakukan untuk menurunkan potensi kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemeliharaan dan eksploitasi hutan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin eksistensi dan keberadaan hutan. Prinsip kelestarian dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang berbicara mengenai kehutanan. Aturan ini telah menjadi landasan dalam penyelenggaraan pada sektor kehutanan nasional, disamping itu telah

diamanatkan bahwa semua wilayah hutan yang ada di Republik Indonesia (RI) termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan dengan maksimal guna kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data dari *website* Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan, sebesar 36,7% termasuk ke dalam kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan yang ada di Pulau Jawa menyentuh angka 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional yaitu sebanyak 26,5 juta penduduk. Data ini menunjukkan Pulau Jawa sebagai penyumbang angka pendudukmiskin terbanyak. Kemiskinan desa yang berada di sekitar hutan khususnya di Pulau Jawa disebabkan oleh beberapa masalah. Masalah-masalah seperti kualitas sumberdaya manusia di sektor kehutanan masih rendah jika dibandingkan dengan kualitas sumberdaya manusia disektor lain, hal ini disebabkan oleh sulitnya para petani hutan dalam mendapatkan akses pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pertanian hutan yang mencukupi. Tak hanya itu, petani hutan yang tinggal di kawasan perhutanan juga kesulitan dalam mendapatkan pemasukan karena kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan milik negara.

Melihat banyaknya desa miskin di sekitar kawasan hutan di Pulau Jawa maka masalah ini dapat dipecahkan dengan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sebuah program pengelolaan hutan secara lestari

dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya dan menjaga kelestarian dan keutuhan hutan. Dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, dapat memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan hak pengusahaan yang diserahkan ke masyarakat. Konsep dari adanya perhutanan sosial ditujukan untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik lahan yang kerap terjadi di kawasan perhutanan.

Pelaksanaan program perhutanan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/2016 mengenai perhutanan sosial. Peraturan menteri tersebut mengatur pengelolaan kawasan hutan pada program perhutanan sosial, menetapkan skema perhutanan sosial yang akan dijalankan, serta memberikan instruksi mengenai penyaluran dan pemberian hak pengolahan hutan, proses perizinan, dan kemitraan di wilayah perhutanan sosial. Pemberian akses kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan dibagi menjadi lima kategori skema, yaitu:

1. Hutan Desa;
2. Hutan Kemasyarakatan;
3. Hutan Tanaman Rakyat;
4. Hutan Adat; dan
5. Hutan Kemitraan.

Program perhutanan sosial memiliki fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan kelompok tani hutan dengan tetap berlandaskan pada aspek kelestarian dan keutuhan hutan. Perhutanan sosial membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, lalu selanjutnya melewati proses perizinan dan jika sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah, maka masyarakat memiliki hak untuk mengelola (melakukan pengelolaan dan mendapatkan manfaat) dari hutan dengan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya memperbesar lahan kelola masyarakat terhadap hutan.

Tabel 1.3 Jumlah Program Perhutanan Sosial menurut Provinsi di Pulau Jawa

No.	Provinsi	Program Perhutanan Sosial
1.	Jawa Barat	71
2.	Jawa Tengah	49
3.	Jawa Timur	49
4.	DKI Jakarta	-
5.	DI Yogyakarta	43
6.	Banten	10

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data pada Publikasi Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019, menunjukkan bahwa program perhutanan sosial Pulau Jawa telah dilaksanakan dengan Jawa Barat sebagai provinsi yang menduduki peringkat pertama provinsi yang mendapat program perhutanan sosial paling banyak. Hal

ini tidak menutup kemungkinan banyaknya program perhutanan sosial di Jawa Barat terbebas dari kendala dan permasalahan sehingga menarik untuk diteliti. Program perhutanan sosial juga sebagai program pendukung misi peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023.

Agenda perhutanan sosial di Jawa Barat dimulai pada tahun 2017 melalui penyerahan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada kelompok tani hutan. Salah satu wilayah yang mendapat IPHPS Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 adalah Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. IPHPS memungkinkan kelompok tani hutan Telukjambe mendapatkan haknya untuk mengelola kawasan hutan perhutanan sosial selama 35 tahun kedepan. Salah satu syarat setelah mendapatkan izin pengelolaan hutan perhutanan sosial adalah menjalankan usaha dari hasil produksi pengolahan hutan, kemudian pada tahun 2020 terbentuklah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Alam Kaliwungu. Terbentuknya KUPS bertujuan agar lebih menguatkan rasa *sense of belonging* para petani yang ada di Telukjambe.

Pasca pemberian izin untuk mengelola hutan perhutanan sosial di Telukjambe dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Telukjambe mendirikan usaha wisata berbasis alam

yang dinamakan Wisata Alam Kaliwungu. Melalui Wisata Alam Kaliwungu, kelompok tani hutan wisata alam Kaliwungu terus mendapatkan pemberdayaan, tetapi dalam menjalankannya kelompok tani hutan wisata alam Kaliwungu menghadapi berbagai permasalahan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan selaku pendamping kelompok tani dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat masalah yang dihadapi kelompok tani sebagai berikut:

“Sebelum saya melaksanakan kegiatan umroh, saya tidak sempat mensosialisasikan dan memberikan informasi bahwa lahan perhutanan sosial tidak boleh didirikan bangunan permanen, semuanya harus semi permanen. Akibat dari tidak diberikannya sosialisasi, kelompok tani membangun bangunan permanen di lahan perhutanan sosial. Hal ini mengganggu pemberdayaan terjadi karena melanggar aturan dan tata tertib program perhutanan sosial.” (Wawancara, 16 April 2023)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Tani Hutan didapati permasalahan yang dirasakan oleh para Kelompok Tani Hutan, yaitu:

“Tiap-tiap petani memiliki sebaran potensi lahan yang berbeda. Terdapat petani yang mendapatkan lahan subur, ada juga yang mendapatkan lahan kurang bagus seperti rawa-rawa. Padahal luas lahan yang diberikan sama, tetapi perbedaan potensi lahan yang membuat beberapa petani ada yang minim memiliki modal dalam membangun usaha.” (Wawancara, 16 April 2023).

Melihat penjelasan dari ketua Kelompok Tani Hutan, dapat dikatakan dalam upaya pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu, ditinjau dari aspek keberhasilan pemberdayaan menurut pandangan dari Wrihatnono dan Dwijowijoto (2007) belum maksimal dalam dimensi kesejahteraan KTH. Permasalahan perbedaan potensi lahan yang menyebabkan

tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha dapat mengganggu stabilitas kesejahteraan petani sehingga belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rakatama dan Pandit (2020), bahwa salah satu masalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial adalah ketidakseimbangan sebaran sumber daya terhadap lahan yang diterima para petani. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Novita, dkk (2018), mendapati bahwa kondisi sumber daya dan potensi lahan garapan yang berbeda-beda menyebabkan ketimpangan pendapatan petani di Kulon Progo dari hasil pertanian.

Berangkat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh kelompok tani hutan Telukjambe dalam pengelolaan perhutanan sosial, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat (kelompok tani hutan) oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dimana sebuah desa memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengolah sumberdaya yang dimiliki dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan bisa mencakup kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Masyarakat desa dapat menentukan pilihannya sendiri mengenai program prioritas yang disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhannya pada saat ini dan mendatang. Pemberdayaan masyarakat

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan. Hakikat dari pemberdayaan itu adalah dapat mengembangkan kapasitas, dimana mencakup kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan, dan kapasitas kelembagaan. Terdapat empat aspek keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007), yaitu:

1. Akses;
2. Partisipasi;
3. Kontrol; dan
4. Kesejahteraan.

Berdasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwijowijoto, terdapat empat aspek yang saling berkaitan. Keempat aspek pemberdayaan itu memiliki hubungan satu sama lainnya dalam usaha-usaha meningkatkan kemampuan dan memberdayakan seseorang atau kelompok. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami oleh kelompok tani hutan Telukjambe dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial dan adanya kesenjangan antara realita dan kondisi ideal sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/2016, sehingga dihasilkan sebuah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui program perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?”.

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti akan meneliti bagaimana pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Telukjambe

melalui program perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat beserta faktor-faktor yang menghambatnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WISATA ALAM KALIWUNGU MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian pada rumah tangga berpenghasilan utama di sektor pertanian
- 1.2.3 Kurangnya pengembangan kapasitas dalam bidang pertanian pada desa di sekitar kawasan hutan
- 2.2.3 Terdapat kendala dalam Pelaksanaan Pemberdayaan kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial

1.3 Perumusan Masalah

- 1.3.1 Apakah Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah berhasil?
- 1.3.2 Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu Melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil setelah penelitian telah usai. Sesuatu yang didapatkan setelah penelitian dijalankan. Dalam hal ini, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

- 1.4.1** Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Keberhasilan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 1.4.2** Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu Melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui penjelasan dan pembahasan yang terkandung dalam penelitian ini diharapkan dapat bergunabagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan kedepannya penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang akademis. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi guna penelitian lebih lanjut di masa yang mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Pada masa yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan pemahaman baru bagi peneliti. Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai pedoman dalam metode penelitian dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian dengan satu lingkup tema yang sama di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan program yang dijalankan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengidentifikasi serta penanganan kendala terkait Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Setio Adiningsih P, Herlina J. R., R. Djoko Andreas N. (2020)	Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi).	Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan oleh Aileen Mitchel Stewart, dengan aspek sebagai berikut: a. <i>Enabling</i> b. <i>Facilitating</i> c. <i>Consulting</i> d. <i>Collaborating</i> e. <i>Mentoring</i>	Hasil penelitian adalah sebagai berikut: a. Program perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Pantai bakti telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. b. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program yaitu kurangnya	Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu secara umum membahas mengenai pemberdayaan kelompok tani selaku target pemberdayaan melalui program perhutanan sosial. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Setio dkk, terletak pada pemilihan lokus dan aspek teori yang digunakan. Setio dkk, memilih lokus di Desa Pantai Bakti dan menggunakan teori pemberdayaan yang

					pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.	diungkapkan oleh Aileen Mitchel Stewart.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Yumantoko (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Narayan dengan aspek sebagai berikut: a. Informasi b. Akuntabilitas c. Partisipasi d. Kapasitas Organisasi Lokal	Hasil penelitian adalah sebagai berikut: a. Program perhutanan sosial di kawasan Hutan Sesaot cukup berhasil terlaksana, ditandakan dengan adanya kenaikan usaha pada bidang pertanian berupa aset dan kemampuan SDM b. terdapat kendala yang terjadi selama pemberdayaan melalui program perhutanan sosial yaitu misinformasi antara fasilitator dengan petani.	Hasil penelitian yang didapatkan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu melihat bagaimana program perhutanan sosial dibalik kaca mata pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yumantoko terletak pada teori dan lokus penelitian yang dipilih. Yumantoko menggunakan teori pemberdayaan oleh Narayan dengan menggunakan aspek informasi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas organisasi lokal. Lokus

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Abdul Kadir Kamaluddin, Mahdi Tamrin (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial di Area KPH Ternate-Tidore.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Kartasmita dengan aspek sebagai berikut: <i>a. Enabling</i> <i>b. Empowering</i> <i>c. Protecting</i>	Hasil penelitian adalah sebagai berikut: a. Pengembangan wisata berbasis alan Akebalanda Kelurahan Moya menggunakan pola pengembangan berbasis masyarakat. Pembangunan ekowisata ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari program perhutanan sosial yang ditujukan guna membangun kemandirian agar dapat sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya hutan.	penelitian terletak di kawasan Hutan Sesaot, NTB. Hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu melihat bagaimana jalannya pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar hutan dengan dasar pemanfaatan potensi lokal melalui perhutanan sosial. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir, dkk adalah terletak pada pemilihan metode penelitian, teori, dan lokus. Penelitian ini menggunakan metode gabungan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian menggunakan teori pemberdayaan dari Kartasmita, dan lokus penelitian berada di Desa Akebalanda, Kelurahan Moya, Kota Ternate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Emi Roslinda, Reni Rianty, Herculana Ersinta (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.	Peneitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	<p>Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Noor dengan aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat mampu b. Memperkuat potensi atau daya c. Melindungi yang lemah 	<p>b. Keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan ekowisata Akebalanda tertuang dalam kekuatan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan program perhutanan sosial.</p> <p>Hasil penelitian menyebutkan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau mendapatkan fasilitas dari pihak pemerintah dan LSM. Bentuk pemberdayaan dituangkan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan potensi hutan yang ada. Masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya ketika sudah</p>	<p>Hasil penelitian ini memilik hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program perhutanan sosial, namun penelitian yang dilakukan oleh Emi Rosalinda, dkk mengambil fokus pada skema hutan kemasyarakatan sedangkan penelitian peneliti berfokus pada skema hutan kemitraan.</p>

					Mendapatkan akses dan pengawasan terhadap kekayaan alam yang ada dan mendapatkan keuntungan dari sumberdaya tersebut.	Perbedaan penelitian juga terletak pada bagian metode, teori, dan lokus. Metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif digunakan pada penelitian ini, teori pemberdayaan oleh Noor, dan pemilihan tempat penelitian di Kabupaten Sanggau.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Andri Irawan, Laurensia Tanzil (2020)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Teguh S dengan aspek sebagai berikut: a. Tahap penyadaran b. Tahap transformasi kemampuan c. Tahap peningkatan intelektual	Hasil penelitian adalah sebagai berikut: a. Tahap penyadaran telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi program pemberdayaan yaitu pengembangan ekonomi produktif b. Tahap transformasi kemampuan telah dilakukan melalui pelatihan terkait teknik pengolahan	Hasil penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu kesamaan topik bahasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui suatu program pemerintah guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan teori dan lokus. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan oleh Teguh S dan berlokasi di Kampung Tomer,

					<p>ikan, manajemen keuangan, dan pemasaran.</p> <p>c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual berhasil dilakukan ditandai dengan meningkatnya pengembangan usaha mandiri masyarakat.</p>	Kabupaten Merauke.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Deditiani Tri I, Lutfi Ariefianto, Dinar Halimi (2019)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan oleh Unicef dalam Mimbar dengan aspek keberhasilan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kesejahteraan b. Akses c. Kesadaran kritis d. Partisipasi e. kontrol 	Hasil penelitian menyebutkan pengembangan program desa wisata organik yang fokus pada kegiatan pemanfaatan dan berdayanya masyarakat karena pengelolaan potensi fisik dan non fisik ,terutama pada aspek partisipasi dan kontrol, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat turut 	Hasil penelitian memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti, yaitu membahas pemberdayaan masyarakat yang berbasis dengan potensi lokal melalui pengembangan ekowisata. Perbedaan terletak pada pemilihan teori dan lokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang diajukan oleh Unicef dalam Mimbar dan lokus

					<p>Berkontribusi pada jalannya program desa wisata organik yang pada pelaksanaannya telah terjadi proses kesadaran pada masyarakat dan perubahan pada dirinya.</p> <p>b. Bentuk pengawasan adalah pengajuan pendapat berbentuk kritik, masukan, dan evaluasi yang tertuang dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).</p>	<p>penelitian berada di Desa Wisata Organik Lombok Kulon, Kabupaten Bondowoso.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Arif Ferdian (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Zubaidi,	Hasil penelitian menyebutkan Program pemberdayaan diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) telah menjalankan	Hasil penelitian berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat oleh bantuan dinas pemerintahan terkait.

		<p>Perdagangan, Perindustrian, dan UKM di Desa Pompaniki.</p>		<p>dengan aspek yang harus diperkuat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan iklim usaha b. Memperkuat potensi yang dimiliki c. Melindungi usaha masyarakat 	<p>tugasnya dengan baik berdasarkan aspek pada teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Zubaidi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan iklim usaha: DP2KUKM telah memberikan fasilitas berupa bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM, menyebarluaskan informasi usaha, kemudahan perizinan mendirikan usaha, dan bantuan promosi dagang. b. Memperkuat potensi yang dimiliki: pengembangan dalam sektor produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, dan memberi desain dan teknologi. 	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitian tertuju pada pemberdayaan para pelaku UMKM. Teori pemberdayaan yang dipilih yaitu teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Zubaidi. Lokus penelitian berada di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang, Kabupateb Luwu Utara.</p>
--	--	---	--	--	---	--

					c. Melindungi usaha masyarakat: menekan persaingan antara Usaha Besar, Mikro, dan Menengah dengan membuat peraturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM dalam pasal 35.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Rani Wahyuningsih, Galih Wahyu Pradana (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Tim Delivery, dengan aspek penelitian sebagai berikut: a. Tahap seleksi	Hasil penelitian menyebutkan bahwa tiap-tiap aspek pemberdayaan telah dilakukan. Ditandai dengan peningkatan dan tingkat kemandirian masyarakat Desa Hendrosari, pengelolaan <i>spot</i> wisatalontar sewu telah dikeloladengan baik, dan sumber daya alam yang tersedia	Hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan aspek teori dan lokus. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Tim Delivery dan lokus

				<p>lokasi</p> <p>b. Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Tahap proses pemberdayaan masyarakat</p> <p>d. Tahap pemandirian masyarakat</p>	<p>telah dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan yang semakin meningkat ditandai dengan banyaknya kerja sama yang telah terjalin antara pihak pengelola wisata dengan pihak luar.</p>	<p>penelitian berasa di Desa Hendrosari, Kabupaten Gresik.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Ian Maryana (2022)	<i>Strategy for Empowering Forest Farmer Groups (KTH) Around the Swala-Mandapa Kadipaten Training Forest, Majalengka, West Java</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan oleh Totok Mardianto dan Poewoko Soebiato, dengan aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bina manusia b. Bina Usaha 	Hasil penelitian menunjukkan kondisi KTH di sekitar kawasan <i>Training Forest</i> sudah lebih baik dari kondisi satu tahun sebelumnya (2021). Strategi pemberdayaan yang paling efektif pada saat ini berdasarkan pada analisis SWOT melalui Manajemen Regional dan Pengembangan Bisnis. Melalui strategi pemberdayaan	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas mengenai kegiatan pemberdayaan yang tertuju kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di suatu wilayah. Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT di bidang Manajemen Regional dan Pengembangan Bisnis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Longgak Arianto Tampubolon (2020)	<i>Community Empowerment in Coastal Community: A Case Study of Social Forestry in North Sumatra, Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	<p>Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Sadan, dengan aspek tahapan pemberdayaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketidakberdayaan b. Dukungan c. Keinginan untuk berkembang d. Kesadaran untuk berkembang e. Keyakinan diri f. Kelompok yang berdaya 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program perhutanan sosial sudah berjalan dengan cukup baik. Terdapat beberapa kendala utama berjalannya pemberdayaan yaitu ketidakaktifan anggota pengelola ekowisata karena pendapatan dari ekowisata dinilai tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, lemahnya sanksi dan aturan yang ditegakan pada siapapun anggota yang melanggar tata tertib, kepemimpinan yang dijalani juga masih bersifat kekeluargaan, sehingga</p>	<p>guna meningkatkan kualitas program yang dapat ditawarkan oleh KTH. Perbedaan lain juga terletak pada pemilihan lokus penelitian.</p> <p>Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan memanfaatkan potensi lokal. Perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan aspek teori pemberdayaan dan lokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori dari Sadan dan berlokasi di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara.</p>

					menyebabkan banyak konflik internal antar anggota kelompok tani.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber jurnal

Tabel 1.4 merupakan tabel penelitian terdahulu yang berisi jurnal penelitian yang peneliti jadikan sebagai referensi. Dapat ditarik kesimpulan, beberapa wilayah di Indonesia telah melaksanakan upaya pemberdayaan kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Seperti pada jurnal penelitian dari Setio Adiningsih, dkk (2020) yang berjudul “Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi)” hasil penelitian menyatakan bahwa pemberdayaan telah mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ditandai dengan peningkatan pendapatan daritingginya hasil produksi tambak udang yang diperoleh. Hal ini baik sebagai tambahan referensi peneliti karena penelitian ini sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam melalui perhutanan sosial. Hal yang membedakan adalah pengambilan lokus dan aspek teori pemberdayaan yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yumantoko (2022) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses penguatan Masyarakat melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB.” mengemukakan hasil penelitian pemberdayaan kelompok tani hutan program pemberdayaan telah berjalan dengan cukup baik ditandai dengan peningkatan aset usaha pertanian dan keterampilan individu. Hal ini dapat menjadi referensi tambahan peneliti karena penelitian ini sama-sama melihat pemberdayaan masyarakat

melalui program perhutanan sosial. Hal yang membedakan adalah pengambilan lokus penelitian dan aspek teori yang digunakan, penelitian ini cenderung lebih memperdalam keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya terdapat persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu memiliki pembahasan tema yang sama secara garis besar yaitu berkaitan dengan pemberdayaan kelompok tani, namun pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada keberjalanan pemberdayaan dan hasil yang akan didapatkan dari pemberdayaan kelompok tani hutan melalui program perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang tentunya berbeda dengan proses pelaksanaannya dengan kajian pada penelitian di atas.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Berdasarkan pandangan dari Nicholas Henry dalam Thoha (2014:18) menjelaskan bahwa perkembangan administrasi dapat ditinjau berdasarkan perubahan paradigmanya. Nicholas Henry menurut pemikirannya menjelaskan terdapat lima paradigme administrasi, yaitu:

1. Dikotomi Politik Administrasi (1900 – 1926)

Pada masa saat itu, menurut pemikiran dari Frank J. Goodnow dan Leonard menyatakan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yakni fungsi politik guna persoalan yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik dan kehendak negara. Kedua sebagai fungsi administrasi yakni berhubungan

dengan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Pada paradigma ini disampaikan dengan tegas bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang bebas nilai dan politik seharusnya tidak mencampuri urusan dari administrasi.

2. Prinsip Administrasi Publik (1971 – 1937)

Pada paradigma ini tokoh terkenalnya yaitu Mary Parker Follet, Henry Fayol, Jame Mooney, dan Alan C. Reile. Pada masa ini, kebanyakan beranggapan bahwa prinsip administrasi publik bersifat *universal* yang berarti tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Tidak adanya batasan ruang dan waktu diartikan berlaku untuk setiap lingkungan tanpa melihat budaya, lingkungan, fungsi, misi dan juga institusi. Prinsip yang ditetapkan pada era ini dikenal dengan POSDCORB (*Planning, Organizing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*). Lokus administrasi yang ada pada era ini tidak dapat diungkapkan secara nyata, hal ini disebabkan dampak dari sifat yang sangat *universal*, namun paradigma ini telah memperjelas pada bagian fokus yang ada.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Periode ketiga kembali membahas mengenai paradigma satu dan dua. Hal yang menjadi persoalan berkaitan dengan pemisahan administrasi dengan politik sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan terdapat persoalan yang berkaitan dengan prinsip administrasi yang tidak konsisten. Serta beranggapan bahwa administrasi publik bukan sesuatu yang bebas nilai melainkan

dipengaruhi oleh nilai. Melalui paradigma ketiga administrasi negara sebagai ilmu politik ini menganggap bahwasanya administrasi publik sebagai ilmu politik dimana letak lokusnya berada di birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi tidak jelas akibat prinsip administrasi yang masih mengandung banyak kelemahan mengakibatkan administrasi publik pada saat ini mengalami krisis identitas karena politik menjadi lebih dominan di ranah administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma keempat ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari paradigma kedua dengan dikembangkan lebih mendalam dan ilmiah. Pada paradigma ini berfokus pada analisis manajemen, perilaku organisasi, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif dan analisis sistem. Adanya dua arah perkembangan, lokus pada paradigma ini juga belum jelas karena fokus yang dikembangkan dapat diterapkan dimana saja.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – sekarang)

Paradigma terakhir ini ini paradigma yang telah memiliki fokus dan lokus atau lokasi studi yang sudah cukup jelas. Fokus dalam administrasi publik adalah teori manajemen, teori organisasi, dan kebijakan publik. Lokusnya terletak pada isu kepentingan yang bersifat umum atau publik. Paradigma ini telah memberikan gambaran fokus yang cukup jelas yang akan dimengerti oleh administrasi publik dan lokus yang dapat diterapkan. Adanya kejelasan ini menjadikan paradigma ini sebagai suatu sistem yang menjembatani antara fokus

administrasi publik dengan tempat studinya atau lokus sehingga adanya keseimbangan antara berbagai variasi teori yang dimanfaatkan untuk mengatasi isu dan kepentingan milik publik yang menjadi lokus dari administrasi publik. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, hal ini memperlihatkan bahwasanya penelitian ini berada di dalam kategori paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan dalam paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik telah dijelaskan antara fokus dan lokus di dalam administrasi publik. Kejelasan fokus dan lokus administrasi publik dalam penelitian ini dimana fokusnya memiliki hubungan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan lokusnya antara lain masalah-masalah publik. Sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai masalah pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1.6.3 Administrasi Publik

Terminologi Administrasi publik jika ditelaah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang mencakup oleh dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” jika kata tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, definisinya adalah kegiatan melayani atau pemenuhan. Selain itu, menurut pandangan Keban, administrasi berarti kegiatan dalam mengarahkan, memerintah, mengimplementasi, menciptakan prinsip-prinsip pengimplementasian peraturan untuk publik, analisis, menyeimbangkan dan mewakili keputusan, mempertimbangkan kebijakan, suatu pekerjaan yang dilakukan secara individu

dan kelompok dengan target untuk menciptakan suatu barang atau jasa publik. Memiliki ruang lingkup kerja pada bidang akademik maupun teoritik. Definisi yang dapat menjelaskan publik adalah kelompok manusia yang memiliki keseragaman dalam pola pikir, perasaan, cita-cita, sikap, dan perilaku yang benar serta taat pada nilai-nilai norma yang dimiliki.

Administrasi publik, berdasarkan pemikiran yang diungkapkan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban 2014:3) adalah sebuah sistem dimana sumberdaya dan pegawai publik diatur disinergikan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengorganisir ketetapan-ketetapan dalam kebijakan publik. Keban menjelaskan bahwa terminologi Administrasi Publik memperlihatkan bagaimana pemerintah memiliki peran sebagai agen yang berdiri sendiri yang bertanggungjawab sebagai pihak yang menciptakan regulasi, yang aktif dan berinisiatif dalam mengatur dan mengambil keputusan, yang telah dipertimbangkan baik serta buruknya untuk masyarakat karena dalam hal ini masyarakat merupakan pihak yang bersifat pasif, tidak berdaya, dan harus mengikuti ketetapan yang telah diatur.

Sedangkan menurut pendapat dari Nicholas Henry dalam Keban (2014:16) memberi batasan bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek yang bertujuan untuk mempromosikan pengetahuan mengenai kontribusi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang berada di bawah pemerintahnya, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap pemenuhan

kebutuhan sosial. Administrasi publik berupaya mengembangkan praktek-praktek manajemen agar dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan pemenuhan secara menyeluruh yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa administrasi publik merupakan gabungan dari teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2012:64) salah satu unsur Administrasi Publik adalah manajemen publik yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia. Dimensi manajemen publik dilihat dari bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Kaitannya definisi tersebut dalam penelitian ini adalah pada upaya pemerintah dalam menjalankan pemberdayaan kelompok tani hutan wisata alam Kaliwungu melalui program perhutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan bersama yaitu menyejahterakan masyarakat.

1.6.4 Manajemen Publik

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh George Terry (dalam Syafie, 2006:49) mengatakan bahwa manajemen adalah sistem yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang tersedia. Pendapat lain oleh Prajudi (dalam Syafie, 2006:49) yang menjabarkan bahwa manajemen penggunaan dan pengawasan dari sumber daya

serta kemungkinan adanya faktor-faktor yang ada melalui kegiatan perencanaan guna mendapatkan sukses dalam meraih tujuan awal. Terdapat beberapa prinsip fundamental bagi studi administrasi publik yang dipopulerkan oleh Wilson (dalam Keban, 2014:100), yaitu:

- a. *Setting* nomer satu organisasi, yaitu pemerintah;
- b. Pihak eksekutif memiliki fungsi sebagai fokus yang diutamakan ;
- c. Kunci sukses dalam meningkatkan kompetensi administrasi terletak pada kegiatan perencanaan prinsip-prinsip dan metode manajemen efektif; dan
- d. Metode dalam membandingkan satu hal dengan yang lain digunakan sebagai metode studi dan pengembangan dalam bidang administrasi publik.

Kolerasi antara manajemen publik dengan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat, yaitu seperti jalinan kapabilitas manajer dalam mengorganisir, dimana dalam pemberdayaan, pihak pemerintah mengatur dan mengorganisir masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia guna meraih sukses sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1.6.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah metode dalam memberikan usaha atau daya (*power*) bagi golongan yang tidak memiliki daya (*powerless*), serta menekan kekuasaan (*disempowered*) bagi golongan yang dinilai memiliki kekuasaan (*powerfull*) sehingga suatu kesetaraan dapat tercipta (Oos M. Anwas, 2014). Pernyataan tersebut dapat diartikan, pemberdayaan berfungsi sebagai pemberi

partisipasi dalam mendapatkan kekuasaan. Konsep pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan konsep yang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan muncul erat kaitannya dari konteks relasi sosial dalam kehidupan dan kekuasaan berasal dari relasi sosial tersebut. Oleh sebab itu, eksistensi kekuasaan dan interaksi relasi kekuasaan tidak dapat berada di satu kondisi yang sama, yakni selalu berubah-ubah.

Menurut Chamber (dalam Munawar, 2011) pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan yang berfokus pada masyarakat dan bergerak di bidang ekonomi dan politik yang bersinggungan dengan dengan *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Hal ini bermaksud pemberdayaan merupakan upaya untuk membangkitkan daya masyarakat melalui dorongan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut. Secara lebih jelas, Chamber mengungkapkan bahwa konsep pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata dilakukan untuk memenuhi hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan suatu usaha untuk mencari solusi alternatif dalam menumbuhkan ekonomi lokal. Menurut Ratnawati (2018:342), Pemberdayaan condong pada bagaimana melakukan transformasi pada pola perilaku masyarakat dengan tujuan masyarakat berdaya sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup. Dalam proses pemberdayaan terdapat usaha yang dapat memacu kesadaran menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal ini berguna untuk mewujudkan kondisi yang

memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat menguatkan yang sebelumnya lemah.

Menurut Kartasasmita (dalam Theresia, 2015:95), menjabarkan bahwa definisi pemberdayaan adalah bentuk upaya guna meningkatkan daya itu sendiri, dengan cara mendorong, memberikan dukungan moral, dan mendongkrak pemahaman kemampuan. Ide pemberdayaan tidak hanya berputar pada pembahasan penguatan individu masyarakat, namun juga meliputi pranata-pranatanya. Pemahaman nilai masa kini (gigih, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab) adalah bentuk-bentuk kegiatan dari pemberdayaan. Sedangkan menurut Jim Ife (1995:56), tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk memberikan kekuasaan pada orang-orang yang dinilai tidak sukses dan lemah. Pemberdayaan mawadahi masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam memunculkan kemampuan diri masyarakat sehingga dapat menentukan nasibnya di masa yang akan datang.

Rapparport (dalam Edi Suharto, 2006) pemberdayaan adalah suatu usaha yang melibatkan peran masyarakat, organisasi, dan komunitas yang ditujukan guna dapat memiliki daya kuasa atas aspek kehidupannya. Upaya pemberdayaan memberikan prioritas pada sektor pendelegasian atau pemberian kekuasaan terhadap seorang individu, kelompok, dan masyarakat yang dapat menata hidup dan lingkungan sekitarnya, serta kapasitas yang dimilikinya. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai perilaku sosial dimana penduduk dalam suatu kelompok mengorganisasikan diri dalam sebuah perencanaan dan tindakan yang

kolektif dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan sosial atau dapat mencukupi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, adanya pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal penting dalam mengatasi beberapa permasalahan seperti keterbelakangan. Lebih lanjut pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat, melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan ide dan swadaya masyarakat, pembaruan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, dan kegiatan lain yang dapat menjadikan masyarakat menjadi mampu sehingga dapat menaikkan tingkat produktivitas.

Menurut Sumodiningrat dalam (Mardikanto, 2013:29), berpendapat mengenai konsep dari pemberdayaan pada masyarakat memiliki fokus pada manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Masyarakat memiliki kontribusi penting dalam pemberdayaan hingga mampu dalam mengubah kesejahteraan hidup mereka. Definisi dari pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendongkrak harkat dan martabat masyarakat. Konsep dari pemberdayaan memiliki tiga komponen, yaitu:

a. Enabling Setting

Mewujudkan iklim dan suasana baik bagi masyarakat sehingga mendukung potensi masyarakat agar berkembang. Tiap-tiap individu masyarakat memiliki daya dalam dirinya yang tidak mereka sadari. Berangkat dari masalah tersebut,

menjadi tugas dari pemerintah atau pelaksana pemberdayaan untuk dapat menyadarkan masyarakat akan potensinya.

b. Empowering Local Community

Berupaya dalam menguatkan kemampuan atau daya yang ada dalam diri masyarakat. Guna mencapai hal ini, dibutuhkan langkah-langkah untuk mendongkrak kemampuan yang terpendam dalam masyarakat hingga mewujudkan kesempatan agar masyarakat menjadi berdaya.

c. Socio-political Support

Proses kegiatan pemberdayaan wajib sifatnya untuk menghindari pihak yang tidak berdaya menjasi semakin parah karena pemberdayaan juga memiliki arti mengayomo. Kegiatan ini adalah usaha dalam memberikan peluang, sarana prasarana, dan sokongan untuk masyarakat guna terus maju. Dukungan dalam aspek ini juga penting, masyarakat sekitar sukar untuk berkembang jika sokongan sosial politik minim didapatkan.

Dari berbagai definisi yang membahas mengenai pemberdayaan, bisa dilihat kesimpulan secara garis besar bahwa definisi yang dapat dimengerti dalam konsep dari pemberdayaan merupakan sebuah bentuk usaha-usaha yang dapat dimanfaatkan oleh satu individu atau kelompok tertentu dari berbagai aktivitas yang diberikan baik kecakapan, peningkatan pengetahuan, penguatan kemampuan atau kapasitas yang menunjang munculnya kemandirian dan terberdaya dalam masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, pemberdayaan juga dimaknai sebagai suatu proses dan tujuan yang mengharapkan suatu lingkungan dapat berkembang secara pesat menjadi lebih baik lagi. Fokus pemberdayaan dalam penelitian ini, lebih bersifat kelompok atau komunitas. Peneliti membuat batasan objek yakni Kelompok Tani Hutan (KTH), sehingga proses pemberdayaan secara kelompok ini dapat meningkatkan kapasitas dari pada suatu kelompok dan dari suatu kelompok tersebut ditujukan untuk mengelola kelompoknya secara mandiri dan dilakukan secara bersama-sama atau kolektif.

1.6.5.1 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013:113) pemberdayaan adalah proses dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat, baik berupa daya atau kuasa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat akrab dikenal dengan usaha dalam mengatasi kemiskinan atau biasa disebut pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:113-116) menyatakan bahwa rumusan Tri Bina adalah usaha utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tri Bina tersusun dari:

a. Bina Manusia

Ilmu manajemen menyebutkan bahwa manusia memegang peranan yang vital, yaitu sebagai sumber daya sekaligus pengelola dari

kegiatan manajemen itu sendiri. Bina manusia adalah usaha utama yang turut diberi perhatian dalam kegiatan pemberdayaan, termasuk semua kegiatan dalam usaha menguatkan dan mengembangkan kapasitas, dapat dijabarkan sebagai:

- 1) Peningkatan kemampuan individu, yang meliputi pengembangan potensi pribadi dan kemampuan dalam dunia kerja.
- 2) Peningkatan kualitas internal dari kelembagaan, yang meliputi sebagai berikut:
 - Jelasnya tujuan dan langkah perencanaan organisasi
 - Terstrukturinya hierarki dalam organisasi, kemampuan, dan langkah-langkah organisasi kedepannya
 - Proses dalam mengelola dan mengorganisir kelompok
 - Peningkatan kualitas internal dan sumber daya organisasi
 - Terjalannya hubungan yang baik antara organisasi dengan pemegang kekuasaan yang lain
- 3) Pengembangan kapasitas sistem jejaring yang meliputi pengembangan interaksi antar organisasi dalam sebuah sistem yang sama dan pengembangan interaksi dengan entitas atau pada pihak organisasi yang ada di luar sistem.

b. Bina Usaha

Bina usaha adalah usaha utama dari kegiatan bina manusia. Jika bina manusia tidak dapat memberikan dampak atau perbaikan kesejahteraan untuk masyarakat maka akan menciptakan persepsi buruk. Hal ini mencakup:

- 1) Menentukan produk dan macam usaha
- 2) Melakukan analisis kelayakan dan strategi dalam berbisnis
- 3) Membuat lembaga perusahaan
- 4) Menetapkan langkah-langkah untuk berinvestasi dan menentukan sumber dana dalam pembiayaan
- 5) Pengaturan sumber daya manusia dan eskalasi jenjang karir
- 6) Manajemen dalam bagian produksi dan pelaksanaan
- 7) Manajemen logistik dan keuangan
- 8) Melakukan observasi dan modernisasi
- 9) Menggalakkan modernisasi dan pengaturan Sistem Informasi Bisnis
- 10) Peningkatan jalinan mitra pada pihak luar
- 11) Memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

c. Bina Lingkungan

Pengembangan AMDAL (Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan) pada tiap-tiap kegiatan menjadikan permasalahan yang

menyangkut terkait lingkungan menjadi penting. Keberlanjutan suatu program juga bergantung pada pelestarian lingkungan. Sangat disayangkan, arti dari lingkungan selama ini hanya sekadar lingkungan fisik, yaitu pelestarian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Padahal, praktik kehidupan lingkungan sosial sangat bergantung dalam mendukung kegiatan.

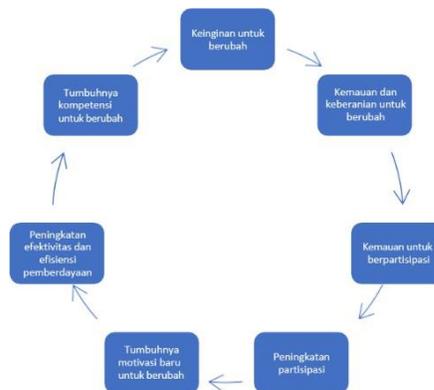
Kesuksesan dari Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan tidak lepas dari efektivitas kelembagaan. Berdasarkan pandangan dari Hayani dan Kikuchi (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:116) memaparkan definisi kelembagaan adalah suatu perangkat umum yang dipatuhi oleh tiap anggota dalam komunitas atau tatanan masyarakat. Relasi sosial dapat dikatakan menjadi sebuah kelembagaan apabila memiliki komponen, yaitu:

- a. Komponen individu, menunjukkan dengan jelas siapa yang terlibat dalam suatu kelembagaan
- b. Komponen Kepentingan, menunjukkan masing-masing pihak terkait memiliki kepentingan sehingga terjalin komunikasi;
- c. Komponen Aturan, menunjukkan tiap-tiap organisasi sudah pasti memiliki aturan yang telah disepakati bersama; dan
- d. Komponen Struktur, menunjukkan tiap-tiap orang mempunyai peran dan posisi masing-masing, tidak dapat diubah sesuka hati.

1.6.5.2 Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat dari Wilson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:112) menyebutkan bahwa siklus pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh rangkaian yang saling berhubungan.

Gambar 1. 1 Siklus Pemberdayaan



a. Keinginan untuk berubah

Hal pertama yang wajib dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu menciptakan kemauan dalam suatu individu untuk berubah dan menata kembali hidup. Usaha pemberdayaan tersebut sulit berjalan jika tidak ada rasa kemauan untuk berubah menjadi lebih baik

b. Kemauan dan keberanian untuk berubah

Tahap kedua adalah untuk menimbulkan rasa kemauan untuk berubah. Agar perubahan dan perbaikan dapat terwujud maka hambatan-hambatan yang harus segera diatasi.

c. Kemauan untuk berpartisipasi

Pemberdayaan sulit untuk berjalan dengan lancar jika tidak terdapat partisipasi yang asalnya datang dari masyarakat, untuk itu kemauan untuk berkontribusi dari masyarakat harus ditingkatkan

d. Peningkatan partisipasi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, akan memunculkan peran dan partisipasi yang berasal dari masyarakat yang sudah menikmati manfaat dari perbaikan tersebut

e. Tumbuhnya motivasi baru untuk berubah

Akibat dari adanya peningkatan peran dan partisipasi oleh masyarakat pada kegiatan pemberdayaan, membuat motivasi atau keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik menjadi meningkat

f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan

Pada fase ini telah terjadi kenaikan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan karena masyarakat sebagai target pemberdayaan sudah sadar atas pentingnya pemberdayaan yang dilakukan

g. Tumbuhnya kompetensi untuk berubah

Pada tahap akhir, setelah masyarakat menyadari dan ingin untuk berpartisipasi dalam perbaikan melalui kegiatan pemberdayaan, waktunya untuk menaikkan kemampuan pada pemberdayaan baru

Konsep tahapan dalam pemberdayaan juga dipaparkan oleh Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:2) sebagai berikut:

a. Penayadaran

Melakukan penayadaran kepada target yang akan diberdayakan, melalui pemberian pencerahan bahwa mereka memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama

b. Pengakapasitasan

Pemberdayaan disini dimaksudkan manusia, organisasi, atau sistem nilai harus memampukan diri. Artinya dalam memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu

c. Pemberian Daya

Pada tahap ini pemberian daya atau *empowerment* dimaksudkan adalah target pemberdayaan diberi daya, kekuasaan, otoritas atau peluang

1.6.5.3 Dimensi Keberhasilan Pemberdayaan

Pandangan dari Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 147-152), menunjukkan terdapat empat dimensi yang digunakan sebagai pengukur berhasil atau tidaknya sebuah pemberdayaan, yaitu:

a. Akses

Dimensi ini erat kaitannya dengan masyarakat sebagai target dari pemberdayaan yang pada akhirnya mempunyai akses akan sumber

daya yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas diri. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh akses ke sumber daya yang tersedia sangat dibutuhkan serta dalam memperoleh kegunaan dari hasil pemberdayaan. Jika tidak mendapat akses maka berdampak pada jalannya pemberdayaan. Salah satu dampak tidak ada akses, dapat terjadi kesenjangan di antara masyarakat.

b. Partisipasi

Keikutsertaan datang dari masyarakat sebagai target pemberdayaan dalam kegiatan yang ada. Peran serta masyarakat sangat kental dalam setiap rencana yang diambil

c. Kontrol

Aspek ini mengamati atau mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar sejalan dengan rencana awal

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari tercukupi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari

1.6.5.4 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pandangan dari Arsiyah (2009:374) menjabarkan pemikirannya bahwa ada beberapa hambatan yang kemungkinan ditemui dalam kegiatan pemberdayaan, hambatannya bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu mencakup (1) terbatasnya SDM (2)

Bahan baku yang tidak tersedia, (3) terbatasnya kemampuan dalam aspek manajerial, (4) tidak ada kemampuan dalam mengelola peluang pasar dan terbatasnya kepemilikan modal usaha. Lebih lanjut, hambatan eksternal antara lain (1) kurang optimalnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, (2) belum ada pihak dari luar yang memberikan dukungan berupa bantuan modal yang dapat digunakan untuk usaha pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Dalam penelitian ini dalam menganalisis faktor penghambat pemberdayaan pada Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu mengacu pada faktor hambatan internal dan eksternal tersebut.

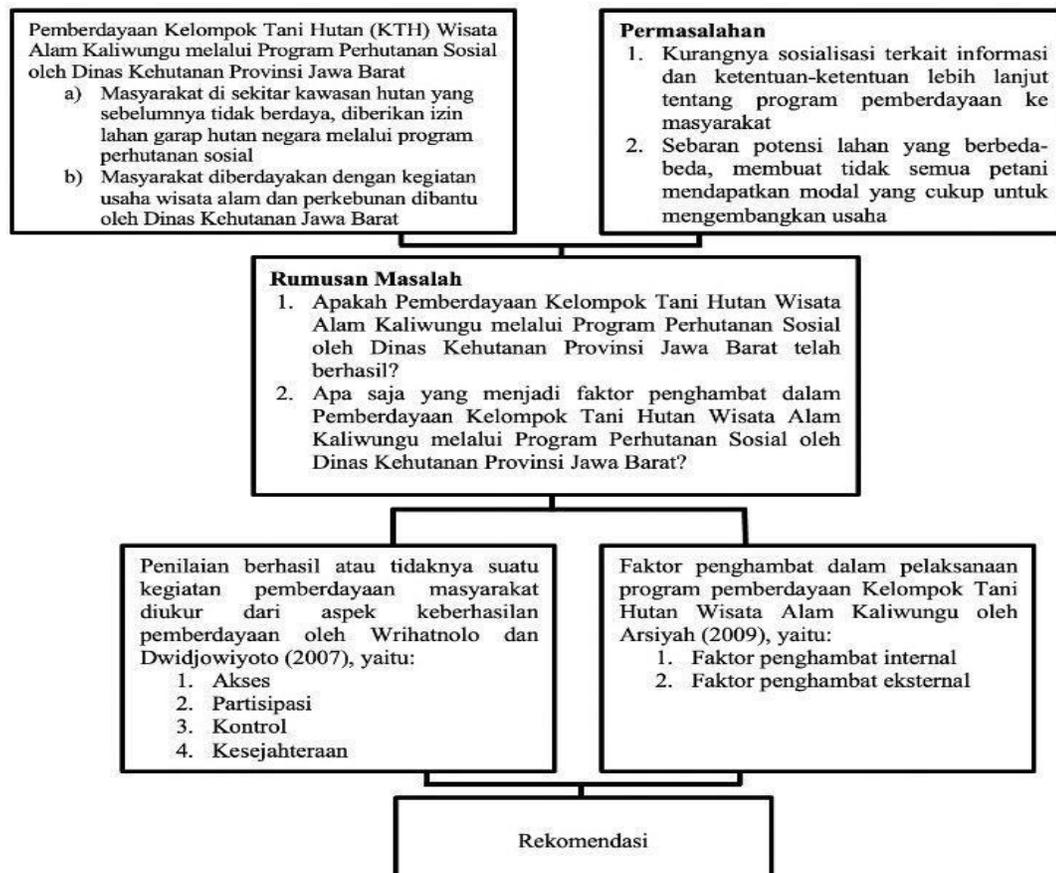
1.6.6 Perhutanan Sosial

PerMen LHK No. 9 Tahun 2021 mengatakan bahwa pengertian Perhutanan Sosial adalah sebuah program pemanfaatan hutan secara lestari yang dilaksanakan di dalam areal atau lahan hutan milik negara yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut sebagai pelaku utama yang bertujuan untuk mendongkrak taraf hidup, kelestarian alam, dan perubahan dalam bidang sosial budaya. Target utama program ini adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari warga negara asli yang bertempat tinggal di area hutan atau di dalam lahan hutan negara.

Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat melalui program ini, diawali dengan peneguhan masyarakat yang tinggal di area dalam dan sekitar hutan. Program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan milik negara. Perhutanan sosial sebagai alat dalam mengatasi permasalahan sumber daya hutan yang muncul. Pada penelitian ini, peneliti meneliti jenis hutan perhutanan sosial dengan kategori Kemitraan Kehutanan dengan kelompok tani hutan sebagai lembaga pengelolanya.

1.6.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini fenomena yang akan diteliti adalah pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Dimensi	Aspek yang Diamati di Lapangan
Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses fisik, berupa kemudahan dalam mendapat sumber dayadan kemudahan akses jalan 2. Akses Non Fisik, berupa minat dari masyarakat mengikutipemberdayaan
	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan KTH dalam pengambilan keputusan 2. Keikutsertaan KTH dalam perencanaan kegiatan 3. Keikutsertaan KTH dalam pelaksanaan kegiatan
	Kontrol	Pendampingan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh KTH
	Kesejahteraan	Tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan KTH

Fenomena	Dimensi	Aspek yang Diamati di Lapangan
Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)/wisata Alam Kaliwungu	Faktor Internal Pemberdayaan	Hambatan yang bersumber dari dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam penyelenggaraan pemberdayaan Wisata Alam Kaliwungu, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan bahan baku 3. Keterbatasan kemampuan manajerial 4. Keterbatasan kemampuan mengelola peluang pasar dan modal
	Faktor Eksternal Pemberdayaan	Hambatan yang bersumber dari luar Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam penyelenggaraan pemberdayaan Wisata Alam Kaliwungu, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat Terbatasnya dukungan yang didapati dari pihak luar

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan difokuskan pada Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam melihat kegiatan pemberdayaan yang didapatkan oleh para petani, sedangkan untuk melihat faktor yang menghambat pemberdayaan Kelompok Tani Hutan tersebut, mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Arsiyah.

Peneliti melihat Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaannya, yaitu terlihat dari kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pendamping dengan kelompok tani, pola pikir petani yang belum mengarah pada produksi berkelanjutan, kurangnya pengetahuan petani dalam pengembangan wisata alam, dan sebaran potensi lahan yang berbeda-beda. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut pandangan dari Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar-gambar, dan bukan angka. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan mengetahui fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi yang diungkapkan dalam kata-kata dan bahasa, yang sesuai dengan konteks yang dialami.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta menganalisis faktor penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu Provinsi Jawa Barat karena KTH ini merupakan salah satu kelompok tani yang ada di provinsi Jawa Barat yang terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemberdayaannya yang menyebabkan pemberdayaan melalui program perhutanan sosial berjalan kurang maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Pemberdayaan harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan masyarakat, serta pendampingan yang intensif agar masyarakat dapat berdaya dengan optimal.

1.9.3 Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan empat informan kunci untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Barat, sebagai narasumber terkait penanggung jawab pelaksanaan program perhutanan sosial.
2. Pendamping Kelompok Tani Hutan dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Barat, sebagai narasumber terkait pelaksanaan pemberdayaan KTH.

3. Sekretaris Jendral Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu, sebagai narasumber pengurus pelaksanaan pemberdayaan KTH.
4. Ketua KUPS Wisata Kaliwungu (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dan anggota-anggota KTH Wisata Alam Kaliwungu, sebagai target sasaran dari pemberdayaan melalui program perhutanan sosial.

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling*. Berdasarkan pandangan dari Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* adalah sebuah metode pengambilan subyek melalui pertimbangan yang berdasarkan dengan ketentuan yang diinginkan guna menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. Subjek yang terdapat dalam penelitian adalah semua pihak yang memiliki hubungan dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu. Pemilihan subjek penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait pemberdayaan serta faktor penghambat pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.9.4 Jenis Data

Data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teks atau kalimat-kalimat dalam bentuk tulisan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1.9.5 Sumber Data

Lofland (1984:47) (dalam Moleong, 2017:157) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif menggunakan kata-kata dan perilaku sebagai sumber data utama, sedangkan data tambahan lainnya hanya bersifat pelengkap. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer penelitian diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu.

2. Data Sekunder

Guna mendapat data sekunder dilakukan pencarian informasi di laman institusi dan artikel jurnal penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan data permasalahan topik yang diambil.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

Teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumen.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara yang menggunakan petunjuk umum wawancara dimana peneliti tidak menentukan format tetap, namun ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan (Moleong, 2017:187). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan acuan yang digunakan hanya menggunakan poin-poin tertentu yang akan ditanyakan menggunakan *open questions* untuk mendapatkan jawaban yang luas karena penelitian ini membutuhkan jawaban mendalam yang tidak hanya cukup sekata.

2. Dokumentasi

Bogdan dan Biklen (1982:102) (dalam Moleong, 2017:160) menyatakan bahwa foto-foto dapat menjadi data deskriptif yang penting dan tak jarang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menelaah segi-segi subjektif. Terdapat dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan, yaitu foto yang dihasilkan oleh orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik dokumentasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan hasil penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Tahapan dalam penelitian ini menggunakan:

1. Reduksi data, yaitu kegiatan yang berfokus pada poin-poin inti

dari hal yang penting

2. Penyajian data, yaitu data yang ada akan terorganisasikan dan tersusun berupa uraian yang memiliki pola sehingga mudah untuk dipahami
3. Kesimpulan, yaitu hasil atau rekapitan dari analisis rumusan masalah yang tersaji

Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi hal yang penting. Selanjutnya, data yang diperoleh perlu direduksi dengan fokus pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu melalui Program Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dari reduksi data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan berakhir membuat kesimpulan sesuai data dan informasi yang diperoleh.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang berarti data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan valid. Peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber data dengan teknik yang sama dengan wawancara melalui narasumber terkait penelitian ini.